

TAHUN
2019



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan Gondosuli Nomor 6 Yogyakarta

Telp. (0274) 588938

Website: <http://www.dpkp.jogjaprov.go.id/>

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah DIY Tahun 2019 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019. LKjIP Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah DIY Tahun 2019 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Yogyakarta, 12 Februari 2020

Kepala Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan DIY



Ir. AROFA NOOR INDRIANI, M.Si.
NIP. 19600729 198603 2 006

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan D.I.Yogyakarta Tahun 2019 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan D.I.Yogyakarta yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Capaian kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah DIY tahun 2019 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis 1 “Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan”:

- Capaian sasaran diukur dengan indikator nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam PDRB.
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 9 (sembilan) Program Yakni Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Peningkatan Produksi Hortikultura, Program Peningkatan Produksi Perkebunan, Peningkatan Populasi Peternakan, Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewan, Pengembangan Sdm Pertanian dan Penyuluhan, Perlindungan Tanaman Pertanian, Pengembangan Perbenihan Pertanian, Program Pengawasan Dan Sertifikasi Benih Pertanian.
- Target capaian indikator sasaran tahun 2019 sebesar 7.112.249 juta rupiah sampai dengan bulan Desember 2019 terealisasi 7.237.162,08. Juta rupiah Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Persentase realisasi terhadap target mencapai 101,76%.
- Dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 7.069.776,5 terjadi peningkatan sebesar 2,37%.

2. Capaian sasaran strategis 2 “Terwujudnya Ketahanan Pangan”:

- Capaian sasaran diukur dengan indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH).
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 1 (satu) program yakni Program Peningkatan Ketersediaan, Akses, Dan Konsumsi Pangan.
- Target capaian indikator sasaran tahun 2019 sebesar 90,22 sampai dengan bulan Desember 2019 terealisasi 95,5. Dengan demikian capaian ini

telah melampaui target. Persentase realisasi terhadap target mencapai 105,85%.

- Dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 89,92 terjadi peningkatan sebesar 5,58 atau 6,2%

3. Capaian sasaran strategis 3 “Pemenuhan Pangan Masyarakat “:

- Capaian sasaran diukur dengan indikator persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan.
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 1 (satu) program yakni program Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan.
- Target capaian indikator sasaran tahun 2019 sebesar 40,29 sampai dengan bulan Desember 2019 terealisasi 39,16. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Persentase realisasi terhadap target mencapai 102,80 %.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah DIY ke depan, sebagai berikut:

1. Penurunan luas lahan pertanian akibat alih fungsi lahan pertanian produktif ke penggunaan non pertanian.
2. Kurangnya jumlah SDM di sektor pertanian karena semakin menurunnya minat generasi muda untuk mengembangkan usaha di bidang pertanian; serta terbatasnya kemampuan akses petani terhadap teknologi, informasi, pasar dan permodalan serta perlindungan usahatani;
3. Dampak perubahan iklim global adalah perubahan pola dan intensitas curah hujan, makin sering terjadinya fenomena iklim ekstrim El-Nino dan La-Nina yang dapat mengakibatkan kekeringan dan banjir, kenaikan suhu udara dan permukaan laut, dan peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam. Bagi sektor pertanian, dampak lanjutan dari perubahan iklim adalah bergesernya pola dan kalender tanam, perubahan keanekaragaman hayati, eksplosi hama dan penyakit tanaman dan hewan, serta pada akhirnya adalah penurunan produksi pertanian.
4. Tingkat konsumsi bahan makanan pokok masih tergantung pada salah satu golongan pangan terutama.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	2
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	3
DAFTAR ISI	5
DAFTAR TABEL	6
DAFTAR GAMBAR.....	7
BAB I PENDAHULUAN	8
1.1 Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah	9
1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Biro Organisasi Setda DIY	11
1.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan.....	13
1.4 Isu-isu Strategis	16
1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran	17
1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2018.....	25
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	26
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD.....	27
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	28
2.3 Struktur Program dan kegiatan 2019	29
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2019.....	32
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	33
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	34
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2019.....	34
3.2. Analisis Ketercapaian Kinerja Tahun 2019	45
3.3. Realisasi Anggaran.....	47
3.4. Inovasi.....	47
BAB IV PENUTUP	49
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

Daftar Tabel

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi.....	17
Tabel I.2 Sarana-Prasarana	23
Tabel I.3 Perbandingan Anggaran Tahun 2018 dan 2019.....	23
Tabel I.4 Rincian Anggaran APBN DPKP DIY.....	24
Tabel II.1 Sasaran Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah DIY, 2017-2022	27
Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	28
Tabel II.3 Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2019	30
Tabel II.4 Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2019	31
Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Kepala Biro Organisasi Setda DIY Tahun 2019	32
Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	34
Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2019.....	35
Tabel III.3 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1	36
Tabel III.4 Perbandingan PDRB <i>Year on Year</i> (YoY).....	36
Tabel III.5 Capaian Program yang Mendukung Pencapaian Sasaran 1 Strategis Tahun 2019	38
Tabel III.6 Produksi Tanaman Pangan di DIY Tahun 2018-2019	38
Tabel III.7 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 2	41
Tabel III.8 Capaian Program yang Mendukung Pencapaian Sasaran 2 Strategis Tahun 2019	41
Tabel III.9 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 3	43
Tabel III.10 Capaian Program yang Mendukung Pencapaian Sasaran 3 Strategis Tahun 2019	44
Tabel III.11 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2019.....	47

Daftar Gambar

Gambar I.1. Cascading Kinerja	9
Gambar I.2. Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	11
Gambar I.3. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Organisasi Biro Organisasi Setda DIY	13
Gambar II.1. Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP.....	33
Gambar III.1. Nilai Tukar Petani Tahun 2018 dan 2019	37
Gambar III.2. Grafik Perbandingan Skor PPH Standar dan Capaian Skor PPH DIY tahun 2019.....	41
Gambar III.3. Persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan tahun 2014-2019	43
Gambar III.4. Website OKKPD	48
Gambar III.5. Inovasi alat pemburu tikus dengan gas elpiji	48

BAB I

Pendahuluan

Bab I berisi:

1. *Cascading Kinerja*
2. *Mandat Kinerja, Proses Bisnis dan Struktur Organisasi*
3. *Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan*
4. *Isu-Isu Strategis*
5. *Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran*
6. *Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun sebelumnya*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan bentuk pertanggung jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

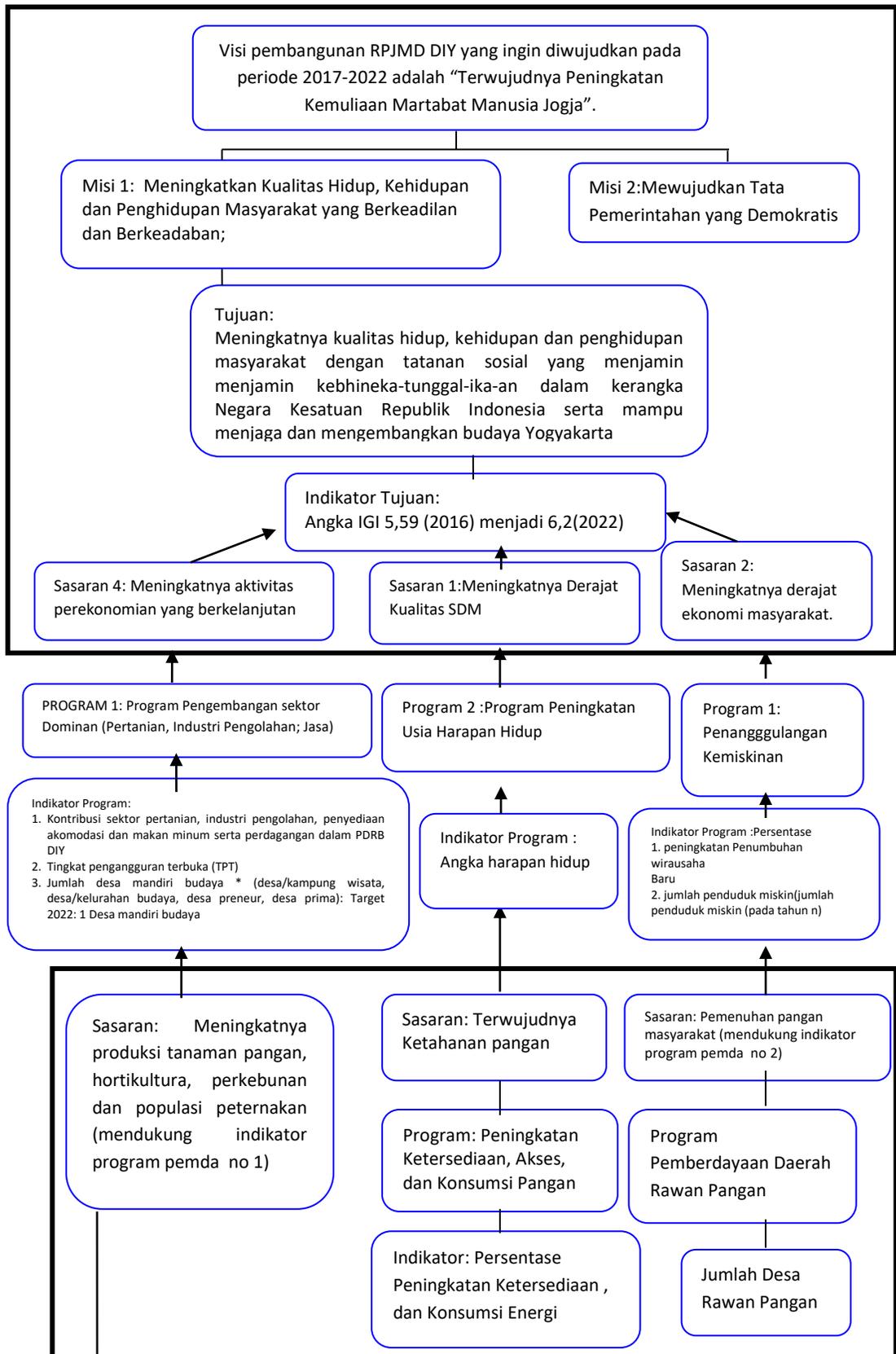
Adapun tujuan penyusunan LKJIP adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

1.1 Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Daerah DIY, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY tahun 2017 – 2022. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah DIY dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Gambar I.1 Cascading Kinerja

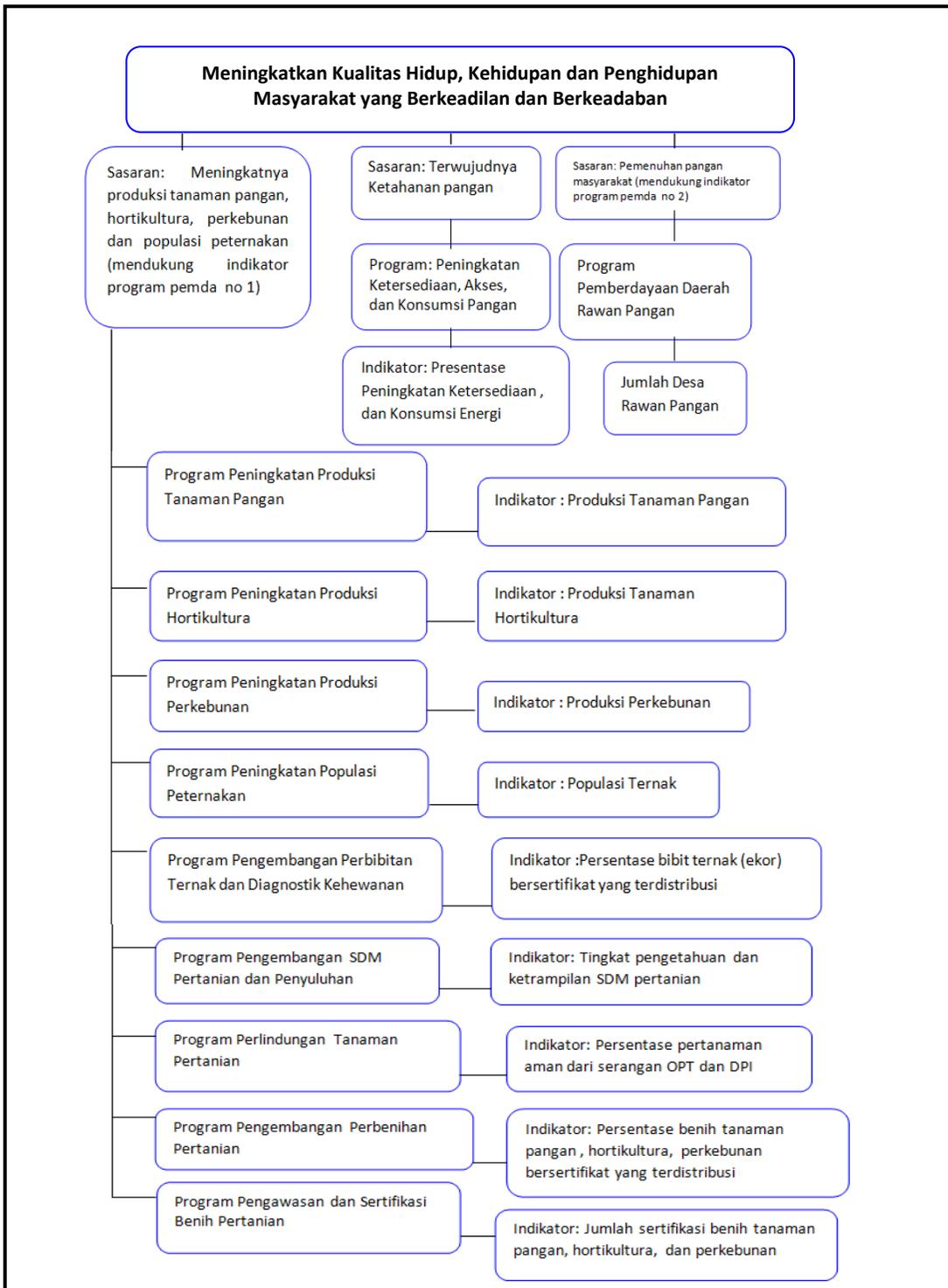


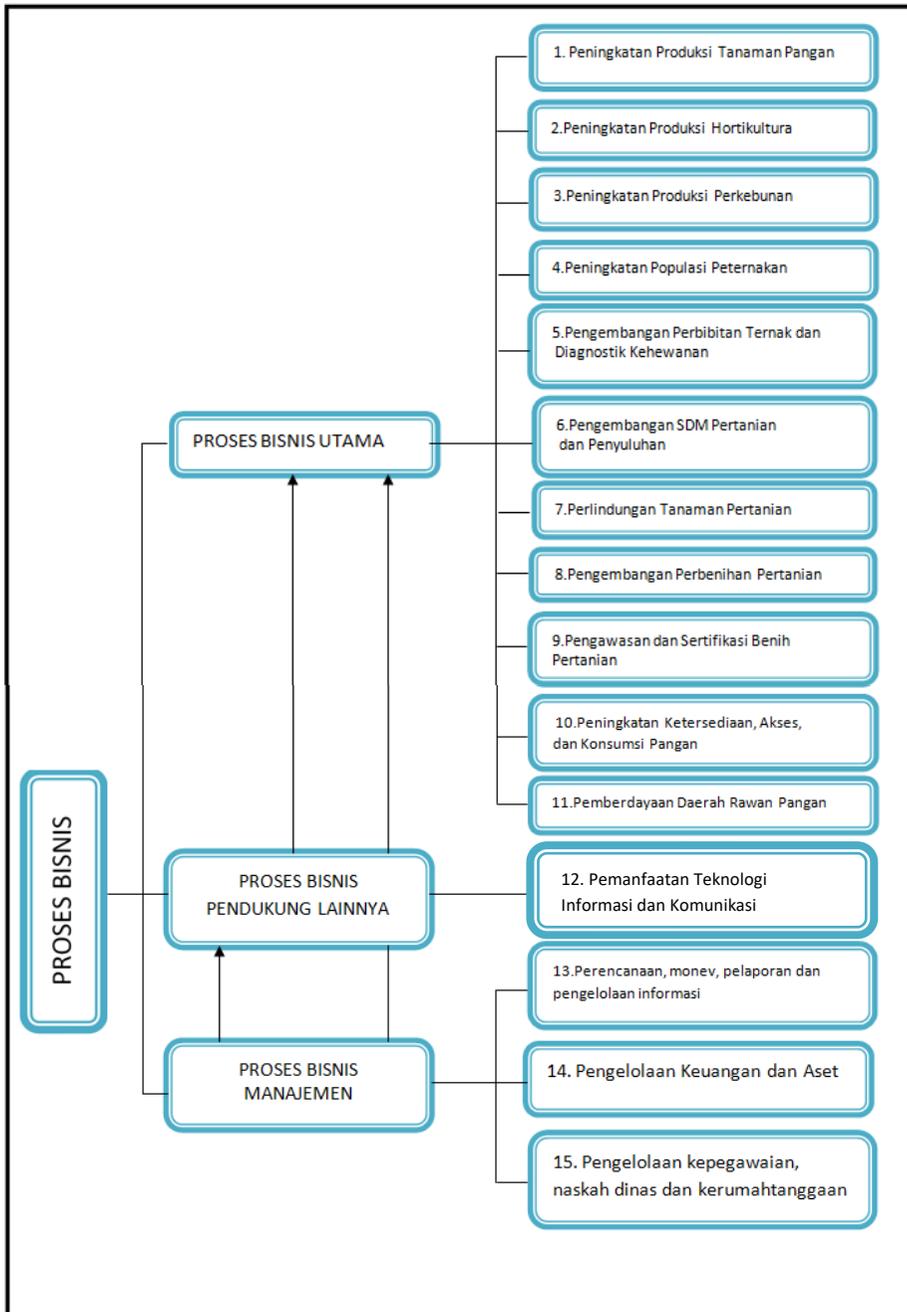


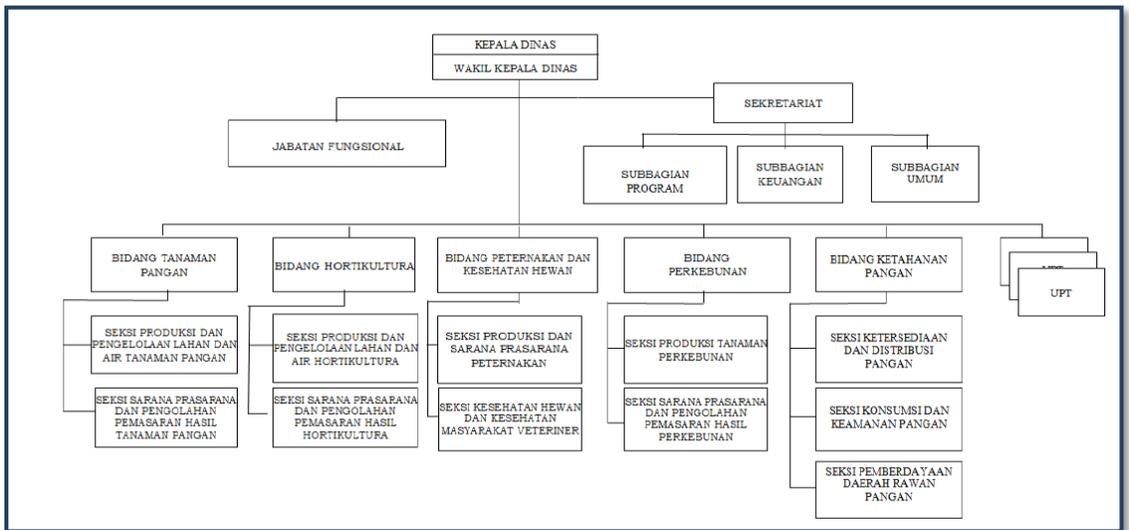
1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY

Hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

Gambar 1.2 Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY







1.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPJMD, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana gambar berikut:

Gambar I.3. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 60 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program kerja dinas;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan kesehatan hewan serta ketahanan pangan;
3. Pelaksanaan fasilitasi dan pengembangan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, serta peternakan dan kesehatan hewan;
4. Pelaksanaan fasilitasi dan pengembangan ketahanan pangan;
5. pelaksanaan pengembangan pascapanen, pengolahan, mutu dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, serta peternakan dan kesehatan hewan;
6. Fasilitasi pembiayaan usaha tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta ketahanan pangan;
7. Pemberian fasilitasi penyelenggaraan bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, serta ketahanan pangan Kabupaten/Kota;
8. Penyelenggaraan kegiatan bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta ketahanan pangan lintas Kabupaten/Kota;

9. Pelestarian tradisi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, serta ketahanan pangan;
10. Pengembangan kemitraan bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, serta ketahanan pangan;
11. Fasilitasi, pelayanan, sertifikasi komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, serta ketahanan pangan;
12. Fasilitasi sarana dan prasarana tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, serta ketahanan pangan;
13. Penyelenggaraan pembinaan, sertifikasi, dan pengawasan benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
14. penyelenggaraan pembinaan, sertifikasi, dan pengawasan benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
15. penyelenggaraan perlindungan tanaman terhadap organisme pengganggu tumbuhan;
16. penyelenggaraan pengujian mutu dan keamanan pangan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan;
17. penyelenggaraan produksi benih sumber tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
18. penyelenggaraan produksi bibit ternak dan bibit pakan ternak;
19. penyelenggaraan diagnostik kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; s. pengembangan sumber daya manusia pertanian;
20. penyelenggaraan penyuluhan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta ketahanan pangan;
21. penyelenggaraan kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan;
22. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
23. pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
24. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
25. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang pertanian dan ketahanan pangan;
26. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota; dan
27. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas

Sesuai pelaksanaan tugas fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan D.I.Yogyakarta merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Jabatan Struktural	Jabatan Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas; 2. Wakil Kepala Dinas; 3. Sekretariat, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Subbagian Program; b. Subbagian Keuangan; dan c. Subbagian Umum. 4. Bidang Tanaman Pangan, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Seksi Produksi dan Pengelolaan Lahan dan Air Tanaman Pangan; dan b. Seksi Sarana Prasarana dan Pengolahan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan. 5. Bidang Hortikultura, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Seksi Produksi dan Pengelolaan Lahan dan Air Hortikultura; dan b. Seksi Sarana Prasarana dan Pengolahan Pemasaran Hasil Hortikultura. 6. Bidang Perkebunan, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Seksi Produksi Tanaman Perkebunan; dan b. Seksi Sarana Prasarana dan Pengolahan Pemasaran Hasil Perkebunan. 7. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Seksi Produksi dan Sarana Prasarana Peternakan; dan b. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. 8. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan; b. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan; dan c. Seksi Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan. 9. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan 10. Jabatan fungsional. <ol style="list-style-type: none"> a. Pengawas Benih Tanaman b. Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman c. Widyaiswara d. Medik Veteriner e. Paramedik Veteriner f. Pengawas Bibit Ternak g. Pengawas Mutu Pakan h. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan i. Analis Pasar Hasil Pertanian j. Analis Ketahanan Pangan k. Pengawas Mutu Hasil Pertanian l. Arsiparis m. Pelaksana Barang 	<ol style="list-style-type: none"> a. Dibawah kasubbag program: <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusun program anggaran dan pelaporan 2) Pengelola sistem dan jaringan b. Dibawah kasubbag keuangan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Bendahara 2) Pengadministrasian keuangan 3) Pengelola gaji 4) Pengelola akuntansi 5) Verifikator data laporan keuangan c. Dibawah kasubbag umum: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadministrasian umum 2) Pengadministrasian persuratan 3) Pranata kearsipan 4) Pengadministrasi kepegawaian 5) Teknisi sarana dan prasarana 6) Pengelola barang milik negara 7) pengemudi d. Dibawah kepala seksi produksi dan pengelolaan lahan dan air TP <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadministrasi umum 2) Pengelola budidaya dan pengembangan TP e. Dibawah kepala seksi sarpras dan pengolahan pemasaran hasil TP <ol style="list-style-type: none"> 1) Analis pemasaran hasil pertanian f. Dibawah kepala seksi produksi dan pengelolaan lahan dan air hortikultura: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadministrasi umum 2) Pengelola lahan pertanian g. Dibawah kepala seksi Sarpras dan pengolahan pemasaran hasil hortikultura: <ol style="list-style-type: none"> 1) Analis pemasaran hasil pertanian h. Dibawah kepala seksi produksi tanaman perkebunan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadministrasi umum 2) Pengawas mutu hasil perkebunan i. Dibawah kepala seksi Sarpras dan pengolahan pemasaran hasil perkebunan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyuluh perkebunan j. Dibawah kepala seksi produksi dan sarana prasarana peternakan <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadministrasi umum 2) Pengelola budidaya pengembangan ternak dan hewan lainnya k. Dibawah kepala seksi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengawas hygiene, sanitasi usaha peternakan dan kesehatan masyarakat veteriner. l. Dibawah kepala seksi ketersediaan dan distribusi pangan <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadministrasi umum 2) Pengelola ketahanan pangan m. Dibawah kepala seksi konsumsi dan keamanan pangan <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengelola pola pangan harapan n. Dibawah kepala seksi pemberdayaan daerah rawan pangan <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengelola ketersediaan dan kerawanan pangan

1.4 Isu-Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu-isu strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tahun 2017-2022 antara lain sebagai berikut:

1. Penanganan tingginya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian;
2. Upaya peningkatan produksi masih rentan terhadap pencemaran, kerusakan, risiko bencana alam dan perubahan iklim;
3. Belum optimalnya mekanisasi pertanian sebagai sarana mengefektifkan dan mengefisienkan usaha tani;
4. Lemahnya kelembagaan petani yang disebabkan masih relatif rendahnya kualitas sumber daya manusia petani;
5. Kurangnya pemenuhan standar mutu hasil, industri pengolahan dan perluasan pemasaran hasil pertanian;
6. Lemahnya akses petani terhadap permodalan;
7. Pengelolaan usaha tani yang berorientasi pada pasar regional dan internasional;
8. Kurangnya jumlah SDM di sektor pertanian karena semakin menurunnya minat generasi muda untuk mengembangkan usaha di bidang pertanian; serta terbatasnya kemampuan akses petani terhadap teknologi, informasi, pasar dan permodalan serta perlindungan usahatani;
9. Kurangnya jalinan kemitraan agribisnis antara kelembagaan petani dengan mitra pemasaran;
10. Kurangnya daya dukung lahan pertanian melalui penerapan teknologi ramah lingkungan, penerapan pola tanam yang tepat.
11. Kondisi kemiskinan yang dapat berlanjut pada kerawanan pangan.
12. Diversifikasi ketersediaan dan konsumsi pangan berkelanjutan.
13. Kondisi dan beban ganda keamanan pangan.
14. Peningkatan produksi komoditas perkebunan terutama pada komoditas tebu, kakao, kelapa, kopi, mete, teh, tembakau, dan cengkeh.
15. Rendahnya nilai tambah dan daya saing produk perkebunan.

1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana, dan Anggaran

a. Dukungan SDM

Dukungan sumberdaya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2019 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan dan Jenis Kelamin

JABATAN	FORMASI		PEGAWAI YANG ADA		JENIS KELAMIN	
	JUMLAH	KUALIFIKASI	JUMLAH	KUALIFIKASI	L	P
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1	S1, S2	1	S2	1	-
Wakil Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1	S1, S2	1	S2	1	-
Sekretaris	1	S1, S2	1	S2	1	-
Kepala Subbagian Program	1	S1	1	S 2	-	1
Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	3	S1	3	S1 , S2	1	2
Pengelola Sistem dan Jaringan	1	S1	1	S1	1	-
Kepala Subbagian Keuangan	1	S1	1	S1	-	1
Bendahara	3	S1	2	S1, SMA	1	1
Pengadministrasi Keuangan	4	D3	2	SLTA	1	1
Pengelola Gaji	1	D3	1	S1	1	-
Pengelola Akuntansi	1	D3	-	-	-	-
Verifikator Data Laporan Keuangan	1	D3	1	SLTA	1	-
Kepala Subbagian Umum	1	S1	1	S2	-	1
Pengadministrasi Umum	1	D3	1	SLTA	-	1
Pengadministrasi Persuratan	1	D3	1	SMP	1	-
Pranata Kearsipan	1	D3	1	SLTA	1	-
Pengadministrasi Kepegawaian	3	D3	3	S1 ,D3, SLTA	-	3
Teknisi Sarana dan Prasarana	1	D3	1	SLTA	1	-
Pengelola Barang Milik Negara	4	D3	3	SLTA	2	1
Pengemudi	2	SLTA	1	SLTA	1	-
Kepala Bidang Tanaman Pangan	1	S1, S2	1	S2	-	1
Kepala Seksi Produksi dan Pengelolaan Lahan dan Air Tanaman Pangan	1	S1	1	S1	1	-
Pengadministrasi Umum	1	SLTA	1	SLTA	1	-
Pengelola Budidaya Dan Pengembangan Tanaman Pangan	4	S1	3	S2, S1	2	1

JABATAN	FORMASI		PEGAWAI YANG ADA		JENIS KELAMIN	
	JUMLAH	KUALIFIKASI	JUMLAH	KUALIFIKASI	L	P
Kepala Seksi Sarana Prasarana dan Pengolahan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	1	S1	1	S2	1	-
Analisis Pemasaran Hasil Pertanian	4	S1	3	S1- SLTA	-	3
Kepala Bidang Hortikultura	1	S1, S2	-	-	-	-
Kepala Seksi Produksi dan Pengelolaan Lahan dan Air Hortikultura	1	S1	1	S2	-	1
Pengelola Lahan Pertanian	5	S1	3	S1, SLTA	2	1
Kepala Seksi Sarana Prasarana dan Pengolahan Pemasaran Hasil Hortikultura	1	S1	1	S1	1	-
Analisis Pemasaran Hasil Pertanian	4	S1	4	S1, SLTA	1	3
Kepala Bidang Perkebunan	1	S1	1	S2	-	1
Kepala Seksi Produksi Tanaman Perkebunan	1	S1	1	S2	1	-
Pengadministrasi Umum	1	SLTA	1	SLTA	-	1
Pengawas Mutu Hasil Perkebunan	4	S1	3	S1, SLTA	1	2
Kepala Seksi Sarana Prasarana dan Pengolahan Pemasaran Hasil Perkebunan	1	S1	1	S1	-	1
Penyuluh Perkebunan	4	S1	3	S1, SLTA	-	3
Kepala Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan	1	S1	1	S2	-	1
Kepala Seksi Produksi dan Sarana Prasarana Peternakan	1	S1	1	S1	1	-
Pengadministrasi Umum	2	D3	1	SLTA	-	1
Pengelola Budidaya Pengembangan Ternak dan Hewan Lainnya	4	S1	3	S1- S2	3	-
Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1	S1	1	S2	-	1
Pengawas Hygiene, Sanitasi Usaha Peternakan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	5	S1	4	S1, SLTA	1	3
Kepala Bidang Ketahanan Pangan	1	S1	1	S2	1	-
Kepala Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan	1	S1	1	S1	1	-
Pengadministrasi Umum	1	SLTA	1	SLTA	1	-

JABATAN	FORMASI		PEGAWAI YANG ADA		JENIS KELAMIN	
	JUMLAH	KUALIFIKASI	JUMLAH	KUALIFIKASI	L	P
Pengelola Ketahanan Pangan	5	S1	5	S1- SLTA	1	4
Kepala Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan	1	S1	1	S1	-	1
Pengelola Pola Pangan Harapan	5	S1	4	S1, SLTA	1	3
Kepala Seksi Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan	1	S1	1	S1	1	-
Pengelola Ketersediaan Dan Kerawanan Pangan	5	S1	5	S1	1	4
Kepala Balai Proteksi Tanaman Pertanian	1	SI,S2	1	S2	1	
Kepala subbag tata usaha uptd BPTP	1	S1	1	S2		1
Bendahara	2	S1	1	SLTA	1	
Pengelola barang milik negara	2	D3	2	SLTA	2	
Pengadministrasi kepegawaian	1	D2	1	SLTA	1	
Penyusun program anggaran dan pelaporan	1	S1	1	D4	1	
Pengadministrasi keuangan	1	D3	-	-		
Pengadministrasi Kesurataan	1	SLTA	1	SLTP	1	
Teknisi sarana dan prasaranan	1	SLTA	1	SD	1	
Pranata Kearsipan	1	D3	1	SLTA		1
Pengelola Akuntansi	1	S1	1	SLTA	1	
Verivikator data laporan keuangan	1	D3	1	SLTA	1	
Pengelola Gaji	1	D3	1	SLTA		1
Kepala seksi pelayanan teknis	1	S1	1	S1	-	1
Pengelola perlindungan tanaman pangan	6	S1	4	SLTA,D4,S1	3	1
Kepala seksi pengendalian organisme pengganggu	1	S1	1	S2	1	
Pengelola organisme pangganggu tanaman	7	S1	4	SLTA,D4,S1	3	1
Kepala Balai Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian	1	S1	1	S2		1
Kepala subbag tata usaha BPSDMP	1	S1	1	S1	1	

JABATAN	FORMASI		PEGAWAI YANG ADA		JENIS KELAMIN	
	JUMLAH	KUALIFIKASI	JUMLAH	KUALIFIKASI	L	P
Penyusun program anggaran dan pelaporan	1	S1	1	S1	1	
Bendahara	1	S1	1	SLTA		1
Pengadministrasi keuangan	1	D3	1	SLTP	1	
Pengelola gaji	1	D3	1	SLTA	1	
Pengelola akuntansi	1	D3	-	-	-	-
Verifikator data laporan keuangan	1	D3	-	-	-	-
Pengadministrasi Persuratan	1	D3	1	SD	1	
Pranata Kearsipan	1	D3	1	SLTA		1
Pengadministrasi Kepegawaian	1	D3	1	SLTA	1	
Teknisi sarana dan prasaranan	1	D3	1	SLTA	1	
Pengelola barang milik negara	2	D3	2	SLTA	2	
Kepala seksi pelatihan pertanian	1	S1	1	S1	1	
Pranata diklat	6	S1	6	SLTA,D3,S1	2	4
Kepala seksi penyuluhan pertanian	1	S1,S2	1	S2		1
Pengelola program penyuluhan	4	S1	3	SLTA, S1	2	1
Kepala Balai Pengembangan Pemibitan Dan Diagnostik Kehewan	1	S2	1	S1	1	
Kepala subbag tata usaha	1	S1	1	S1		1
Pengelola Barang Milik Negara	2	D3	2	SLTA	1	1
Pengadministrasi Keuangan	1	D3	1	SLTA		1
Pengadministrasi Kepegawaian	1	D3	1	SLTA	1	
Pengelola Akuntansi	1	D3	1	D3		1
Pengelola Gaji	1	D3	1	SLTA	1	
Bendahara	2	S1	1	SLTA		1
Teknisi Sarana dan Prasarana	1	S1	1	S1		1
Kepala Seksi Perbibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	1	S1	1	S1		1
Pengelola Peternakan	7	D3	8	SD,SLTP,SLTA	8	
Pengawas Mutu Pakan dan Produksi Bibit Ternak Besar	3	S1	2	S1	1	1
Kepala Seksi Diagnostik Kehewan	1	S1	1	S2	1	
Pengelola Laboratorium	6	D3	5	SD,SLTA,D3,S2	3	2

JABATAN	FORMASI		PEGAWAI YANG ADA		JENIS KELAMIN	
	JUMLAH	KUALIFIKASI	JUMLAH	KUALIFIKASI	L	P
Kepala Balai Pengemangan Perbenihan Dan Mutu Benih Tanaman Pertanian	1	S1	1	S2	1	
Kepala subbag tata usaha BPPMBTP	1	S1	1	S1		1
Pengadministrasi Persuratan	1	D3	1	SLTA	1	
Pranata Kearsipan	1	D3	1	SLTP	1	
Penyusun program anggaran dan pelaporan	1	S1	1	S1	1	
Pengadministrasi Kepegawaian	1	D3	1	SLTA	1	
Pengelola barang milik negara	2	D3	2	SLTA	1	1
Bendahara	1	S1	1	SLTA	1	-
Pengadministrasi keuangan	1	D3	1	SLTA	1	
Pengelola gaji	1	D3	1	SLTA	1	
Pengelola akuntansi	1	D3	-	-	-	
Verifikator data laporan keuangan	1	D3	1	SLTA	1	
Teknisi sarana dan prasaranan	1	D3	1	SLTA	1	
Kepala Seksi Pengembangan Produksi Benih Tanaman Pertanian	1	S1	1	S1	1	
Analisis Potensi Perbenihan	2	S1	2	S1/SLTA	2	
Pengelola Teknologi Perbenihan	33	D3	32	S2/S1/SLTA	28	4
Kepala Seksi Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pertanian	1	S1	1	S2		1
Penguji coba Pembibitan dan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	3	S1	2	S1/SLTA	1	1
Jabatan Fungsional						
Penyuluh Pertanian	11	SLTA, S1, S2	9	S1	3	6
Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP)	42	SLTA, S1, S2	19	S1, S2	5	14
Analisis Pasar Hasil Pertanian (APHP)	5	SLTA, S1, S2	2	S1	1	1
Analisis Ketahanan Pangan (AKP)	4	S1, S2	4	S1	2	2
Arsiparis	1	D3	1	SLTA	-	1
Widyaiswara	9	S2	2	S1, S2	-	2
Pengawas Benih Tanaman (PBT)	37	SLTA, S1,	18	SLTA, S1	8	10

JABATAN	FORMASI		PEGAWAI YANG ADA		JENIS KELAMIN	
	JUMLAH	KUALIFIKASI	JUMLAH	KUALIFIKASI	L	P
Pengawas Benih Ahli	9	S1	15	S1	10	5
Pengawas Benih Terampil	15	S1	2	S1	1	1
Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman	3	S1	-	-	-	-
Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT)	74	SLTA, S1, S2	41	SLTA, S1, S2	34	7
Medik Veteriner	8	S1 Kedokteran Hewan	4	S1 Kedokteran Hewan	2	2
Paramedik Veteriner	5	Sek. Peternak D III Peternakan	3	Sek. Peternak D III Peternakan	1	2
Pengawas Bibit Ternak	7	S1	2	S1	2	-
Pengawas Mutu Pakan	7	S1	2	S1, DIII	1	1
CPNS INDUK	6	S1	6	S1	2	4
CPNS BPSDMP	2	S1	2	S1	-	2
CPNS BPTP	7	S1	7	S1	2	5
CPNS BP3MBTP	1	S1	1	S1	1	-
CPNS BPPTDK	13	DIII, S1	12	DIII, S1	6	6
	508		362		211	151

Berdasarkan data pada tabel I.1, jumlah pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sejumlah 362 dengan jumlah laki laki sebanyak 211 dan perempuan sebanyak 151. Jumlah pegawai laki laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pegawai perempuan. Jumlah formasi sebanyak 508 orang. Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 146 orang, terdiri dari pejabat pelaksana substantif dan pejabat pelaksana administratif, serta 59 pegawai yang tidak memenuhi kualifikasi jabatan. Tingkat pendidikan paling tinggi adalah lulusan S2 sedangkan terendah adalah lulusan SD. Berdasarkan jenjang pendidikan didominasi oleh lulusan S1.

b. Keadaan Sarana dan Prasarana

Keadaan Sarana dan Prasarana di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY dapat dilihat pada tabel I.2. Pengelolaan aset dari APBN menggunakan aplikasi SIMAK-BMN sedangkan aset dari APBD dikelola menggunakan aplikasi SIMBADA.

Tabel I.2 Sarana-Prasarana

No.	Jenis barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)
1	Tanah	40	110.419.407.899
2	Alat-Alat Besar	54	1.561.208.308
3	Alat-Alat Angkutan	303	6.822.645.079
4	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	49	311.623.306
5	Alat Pertanian	397	9.078.078.200
6	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	3.464	10.612.852.308
7	Alat Studio Dan Alat Komunikasi	228	1.434.179.200
8	Alat-Alat Kedokteran	14	66.107.615
9	Alat Laboratorium	378	7.361.062.805
10	Alat-Alat Persenjataan/Keamanan	8	26.000.000
11	Bangunan Gedung	165	103.300.428.352
12	Monumen	1	47.750.000
13	Jalan dan Jembatan	10	2.574.642.790
14	Bangunan Air/Irigasi	22	3.766.436.040
15	Instalasi	26	690.698.681
16	Jaringan	21	444.709.009
17	Buku Perpustakaan	509	27.514.080
18	Barang Bercorak Kebudayaan	14	280.000
19	Hewan Dan Ternak serta Tanaman	392	2.190.071.875
Total		6095	260.735.695.547

Sumber: Dinas Pertanian DIY, 2020

Sarana prasarana sebagaimana yang tersaji diatas digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY.

c. Anggaran

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan D.I.Yogyakarta pada tahun 2019 berasal dari APBD Daerah Istimewa Yogyakarta disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel I.3 Perbandingan Anggaran Tahun 2018 dan 2019

Tahun	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Jumlah
2018	Rp. 19.453.163.694,00	Rp. 68.957.451.872,00	Rp. 88.410.615.566,00
2019	Rp. 24.522.969.872,00	Rp. 41.198.448.425,00	Rp. 65.721.418.297,00

Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2019 dibanding tahun 2018 terdapat penurunan anggaran belanja. Selain anggaran dari APBD, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan juga mengelola anggaran yang

bersumber dari Dana Kesistimewaan (Dais) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dana keistimewaan yang di kelola Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan pada tahun 2019 sejumlah Rp 1.095.438.000,00. Kegiatan Dais tahun 2019 merupakan kegiatan Pengembangan Lumbung Mataraman termasuk ke dalam program Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya. Program ini merupakan program dari Dinas Kebudayaan DIY, sedangkan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menjadi KPA dalam program tersebut.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terdapat 12 satker baik Dekonsentrasi maupun Tugas Pembantuan yang mengelola dana APBN di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan pada tahun 2019. Total anggaran dana APBN yang dikelola Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY adalah sebesar Rp 75.063.092.000,00. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tersebut dapat dilihat pada tabel I.4

Tabel 1.4 Rincian Anggaran APBN DPKP DIY

No	Kode Satker		Total Anggaran (Rp)
1	049025	Dekonsentrasi Hortikultura	4.804.770.000
2	049028	Dekonsentrasi PSP	981.095.000
3	049037	Dekonsentrasi Ketahanan Pangan	9.382.620.000
4	049058	Dekonsentrasi Perkebunan	843.700.000
5	049059	Dekonsentrasi Tanaman Pangan	2.941.797.000
6	049062	Dekonsentrasi Sumberdaya Manusia Pertanian	6.116.828.000
7	049087	TP Tanaman Pangan	11.882.336.000
8	049088	TP Hortikultura	7.694.500.000
9	049089	TP Perkebunan	4.965.984.000
10	049090	TP Peternakan dan Kesehatan Hewan	12.008.517.000
11	049093	TP PSP Perkebunan	1.311.950.000
12	049094	TP PSP Pertanian	12.128.995.000
TOTAL			75.063.092.000

Sumber: monev.anggaran.kemenkeu.go.id

1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2018

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
----	-------------------	---------------

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	<p>Surat Inspektur DIY Nomor: 700/01339 tanggal 6 Juni 2019, perihal Laporan Hasil Evaluasi Implementasi Sistem AKIP tahun 2018 pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY</p> <p>Rekomendasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada tahun anggaran berikutnya diharapkan melakukan tindakan perbaikan yang lebih optimal terutama terkait dengan capaian kinerja organisasi meliputi <i>output</i>, <i>outcome</i>, dan kinerja dari penilaian <i>stakeholder</i>. 	<p>Sebagai pengampu urusan pertanian dan pangan di DIY saat ini, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam rangka menindak lanjuti Laporan Hasil Evaluasi Implementasi Sistem AKIP tahun 2018 pada Dinas Pertanian serta BKPP pada tahun 2019 melakukan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan langkah-langkah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak lanjut terkait dengan capaian kinerja organisasi meliputi <i>output</i>, <i>outcome</i>, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY telah melakukan koordinasi internal, Kepala beserta seluruh karyawan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY telah berkomitmen untuk memperbaiki kekurangan terkait capaian kinerja organisasi dengan cara mempersiapkan dokumen perencanaan dengan lebih baik, memonitor pelaksanaan kegiatan, dan mengadakan evaluasi atas pencapaian <i>output</i>, <i>outcome</i> dan kinerja utama secara periodik.
2.	<p>Surat Inspektur DIY Nomor: 700/01341 tanggal 6 Juni 2019, perihal Laporan Hasil Evaluasi Implementasi Sistem AKIP tahun 2018 pada Dinas Pertanian Daerah DIY</p> <p>Rekomendasi:</p> <p>Rekomendasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada tahun anggaran berikutnya diharapkan melakukan tindakan perbaikan yang lebih optimal terutama terkait dengan capaian kinerja organisasi meliputi <i>output</i>, <i>outcome</i>, dan kinerja dari penilaian <i>stakeholder</i>. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Terkait penilaian kinerja <i>stakeholder</i>, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY telah melaksanakan survey kepuasan masyarakat sesuai Peraturan Gubernur DIY No.68 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dengan hasil IKM sebesar: 87,07, kriteria mutu pelayanan: B, dan kinerja: Baik.

BAB 2

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab 2 Berisi:

1. *Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD*
2. *Strategi dan Arah Kebijakan*
3. *Struktur Program dan Kegiatan 2019*
4. *Perjanjian Kinerja Tahun 2019*
5. *Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD*

Memasuki Tahun 2019, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan D.I.Yogyakarta menyusun Review Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan D.I.Yogyakarta Tahun 2017-2022. Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan D.I.Yogyakarta merupakan manifestasi komitmen Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan D.I.Yogyakarta dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah DIY yang tertuang dalam RPJMD DIY Tahun 2017-2022. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan D.I.Yogyakarta Tahun 2017-2022 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2012-2017).

RPJMD Pemerintah Daerah DIY merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan D.I.Yogyakarta yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Tahun 2017-2022 ditetapkan melalui Peraturan Gubernur DIY No. 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022. Renstra ini sudah direview dua kali, terakhir ditetapkan dengan Pergub No 39 Tahun 2019.

3.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Pembangunan pertanian dan ketahanan pangan sesuai dengan RPJMD Tahun 2017-2022 masuk dalam misi pertama yaitu “Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat yang Berkeadilan dan Berkeadaban” dengan tujuan “Meningkatnya kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin kebhinekaan serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta”. Sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang akan mendukungnya adalah:

- 1) Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
- 2) Terwujudnya ketahanan pangan;
- 3) Pemenuhan pangan masyarakat.

Mengacu pada Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD 2017-2022 dan analisis isu strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang telah ditetapkan, maka Sasaran, dan Target Kinerja Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah yang hendak dicapai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY dalam kurun waktu 2017- 2022 adalah:

Tabel II.1 Sasaran Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah DIY, 2017-2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline (2016/2017)	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra
					2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultur, perkebunan dan peternakan	Nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam PDRB (Juta rupiah) (Sumber BPS)	Juta Rupiah	6.903.079	7.041.831	7.112.249	7.183.372	7.255.205	7.327.757	7.327.757
2.	Terwujudnya ketahanan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	88,5	89,92	90,22	90,52	90,82	91,12	91,12
3.	Pemenuhan pangan masyarakat	Persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan	%	40,52	N/A	40,29	39,74	39,19	38,65	38,65

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatnya nilai produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan dan mengamankan produksi komoditas utama dan unggulan daerah; 2. Meningkatkan mutu produk tanaman pangan hortikultura berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan; 3. Memperkuat kelembagaan petani dan memberdayakan petani dalam melakukan agribisnis produk unggulan pertanian untuk meningkatkan akses petani terhadap faktor produksi, teknologi, informasi, pemasaran maupun akses permodalan sehingga dapat meningkatkan kualitas SDM petani; 4. Meningkatkan penggunaan aplikasi teknologi pertanian oleh masyarakat; 5. Mengembangkan potensi ternak lokal; 6. Mengembangkan kawasan berbasis komoditas unggulan; 7. Membangun sentra-sentra pembibitan ternak lokal; 8. Melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan; 9. Mengembangkan teknologi produksi pertanian domestik melalui penerapan <i>Good Agriculture Practices (GAP)/Standard Operating Procedure (SOP)</i>; 10. Mengendalikan organisme pengganggu tumbuhan (OPT), mengendalikan penyakit hewan menular strategis dan menangani dampak bencana alam dan perubahan iklim untuk mengamankan produksi pertanian; 11. Menyediakan sarana prasarana (pupuk, benih, bahan pengendalian OPT, alsintan, sumber daya air, dan permodalan); 12. Meningkatkan nilai tambah produk pertanian melalui penerapan <i>Good Handling Practices (GHP)</i>, <i>Good Manufacturing Practices (GMP)</i>, <i>Good Distribution Practices (GDP)</i> dan <i>Good Marketing/Retail Practices (GRP)</i>; 13. Mempromosikan dan memasarkan produk per- tanian di pasar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan produksi tanaman dan populasi ternak yang berdampak bagi peningkatan pendapatan petani; 2. Peningkatan daya saing produk pertanian melalui standarisasi produk dan proses, peningkatan rantai pasok, mutu dan keamanan pangan; 3. Pengembangan infrastruktur (lahan, air, sarana dan prasarana); 4. Pengembangan kawasan yang berdampak terhadap pendapatan petani; 5. Pengembangan sentra-sentra pembibitan ternak lokal; 6. Pendampingan dan pengawalan kelompok. 7. Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh, pemantapan kelembagaan penyuluhan, dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan penyuluhan

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		domestik maupun internasional; 14. Melindungi petani melalui regulasi subsidi harga produk; 15. Memfasilitasi prasarana dan sarana penyediaan pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH); 16. Menumbuhkembangkan minat generasi muda bekerja di sektor pertanian melalui penumbuhan wirausahawan muda pertanian, pemberian modal usaha bagi generasi muda yang bergerak di sektor pertanian, pendidikan dan latihan khusus pertanian/agribisnis pertanian bagi generasi muda; 17. Mengembangkan kemitraan antar poktan/gapoktan/lembaga petani dengan pihak ketiga dalam membangun rantai pasokan (<i>supply chain management</i>);	
2.	Terwujudnya ketahanan pangan	Meningkatkan ketersediaan, akses, konsumsi, dan keamanan pangan	1. Pemantapan ketersediaan dan kewaspadaan pangan melalui koordinasi lintas sektor 2. Peningkatan cadangan pangan daerah (masyarakat dan pemerintah) 3. Peningkatan diversifikasi/penganekaragaman pangan berbasis pangan lokal 4. Penanganan keamanan pangan, pengawasan pangan beredar, dan sertifikasi/registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan 5. Pengembangan distribusi pangan yang merata dan terjangkau, stabilisasi harga pangan strategis, dan pemantauan distribusi, harga, akses pangan. 6. Penyelenggaraan dan pelaksanaan Pusat Perbenihan
3.	Pemenuhan pangan masyarakat	Pemberdayaan masyarakat di daerah rawan pangan	1. Penurunan jumlah Desa Rawan Pangan 2. Peningkatan aksesibilitas pangan masyarakat 3. Pemenuhan kecukupan pangan masyarakat

3.3. Struktur Program dan Kegiatan 2019

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pangan DIY tahun 2019 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.3 Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2019

Sasaran	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)
1. Meningkatkan produksi tanaman pangan hortikultura, perkebunan dan peternakan	1.1. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN	6.543.053.860
	1.1.1. Budidaya Tanaman Pangan	1.924.687.000
	1.1.2. Standarisasi Mutu Produk Pertanian dan Pemasaran Hasil Tanaman	44.968.000
	1.1.3. Operasionalisasi Jogja Agro Techno Park	4.573.398.860
	1.2. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HORTIKULTURA	1.786.193.000
	1.2.1. Budidaya Tanaman Hortikultura	1.523.231.000
	1.2.2. Standarisasi Mutu Produk Pertanian dan Pemasaran Hasil Hortikultura	262.962.000
	1.3. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERKEBUNAN	1.584.262.000
	1.3.1. Kelembagaan Petani Tembakau (Cukai)	182.117.000
	1.3.2. Budidaya Tanaman Perkebunan	633.386.000
	1.3.3. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Perkebunan	342.857.000
	1.3.4. Budidaya Tanaman Tembakau (cukai)	425.902.000
	1.4. PROGRAM PENINGKATAN POPULASI PETERNAKAN	2.789.979.000
	1.4.1. Budidaya Peternakan	2.540.229.000
	1.4.2. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	249.750.000
	1.5. PROGRAM PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN	4.250.179.060
	1.5.1. Produksi Bibit Ternak	3.421.078.560
	1.5.2. Pengujian Penyakit Hewan dan Produk Pangan Asal Hewan	829.100.500
	1.6. PROGRAM PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN DAN PENYULUHAN	728.010.520
	1.6.1. Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	200.000.000
	1.6.2. Pelatihan SDM Pertanian	528.010.520
	1.7. PROGRAM PERLINDUNGAN TANAMAN PERTANIAN	477.884.580
	1.7.1. Pengendalian OPT Tanaman Pertanian	301.745.900
1.7.2. Penyediaan Data dan Informasi Perlindungan Tanaman Pertanian	176.138.680	
1.8. PROGRAM PENGEMBANGAN PERBENIHAN PERTANIAN	1.981.810.328	
1.8.1. Produksi Benih Tanaman Pangan	1.220.153.213	
1.8.2. Produksi Benih Tanaman Hortikultura	460.408.315	
1.8.3. Produksi Benih Tanaman Perkebunan	301.248.800	
1.9. PROGRAM PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERTANIAN	393.646.365	

Sasaran	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)
	1.9.1 Sertifikasi Perbenihan Tanaman Pertanian	350.426.215
	1.9.2 Pengawasan Perbenihan Tanaman Pertanian	43.220.150
	Total Nilai Anggaran yang mendukung Sasaran 1	20.535.018.713
2. Terwujudnya ketahanan pangan	2.1. PROGRAM PENINGKATAN KETERSEDIAAN, AKSES, DAN KONSUMSI PANGAN	2.136.336.100
	2.1.1. Penyediaan Cadangan Pangan	627.500.000
	2.1.2. Distribusi Pangan Masyarakat	391.500.000
	2.1.3. Penyelenggaraan Jogja Benih	262.336.100
	2.1.4. Pengawasan Keamanan Pangan	250.000.000
	2.1.5. Gerakan Penganekaragaman Pangan	605.000.000
	Total Anggaran yang Mendukung Sasaran 2	2.136.336.100
3. Pemenuhan pangan masyarakat	3.1. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAERAH RAWAN PANGAN	524.986.500
	3.1.1. Penanganan Desa Rawan Pangan	454.488.000
	3.1.2. Analisis Data Ketahanan dan Kerentanan Pangan	70.498.500
	Total Anggaran yang Mendukung Sasaran 3	524.986.500
Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran		23.196.341.313

Tabel II.4 Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2019

No.	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)
1.	1. Program Administrasi Perkantoran	4.479.162.172
	1.1. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.954.843.060
	1.2. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	2.254.079.112
	1.3. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	270.240.000
2.	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	13.011.096.500
	3.1. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	526.850.000
	3.2. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.142.120.000
	3.3. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	137.865.000
	3.4. Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	135.646.000
	3.5. Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	3.068.615.500
	3.6. Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Kantor UPTD BPPMBTP dan Sarana Pendukungnya (DAK)	3.371.273.800
	3.7. Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta Penyediaan Sarana Pendukungnya (DAK)	2.626.138.200
	3.8. Pengadaan Peralatan, Perlengkapan, dan Kendaraan UPTD BPPTDK (DAK)	2.002.588.000

No.	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)
3.	3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	44.770.000
	2.1. Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	44.770.000
4.	4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	467.078.440
	4.1. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4.998.000
	4.2. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	13.012.000
	4.3. Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	348.302.440
	4.4. Monitoring dan Evakuasi Pelaksanaan Program/Kegiatan SKPD	100.766.000
Total Anggaran Pendukung		18.002.107.112

3.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Gubernur DIY adalah sebagai berikut:

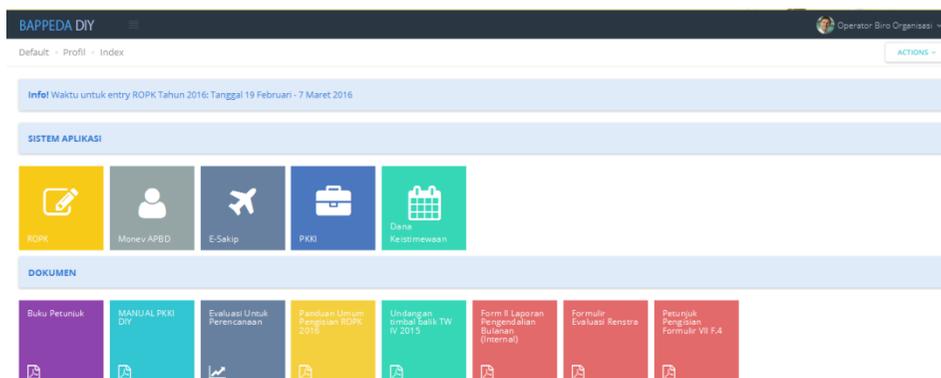
Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Kepala DPKP DIY Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan	Nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam PDRB (<i>Sumber BPS</i>)	Juta rupiah	7.112.249	Triwulan I	6.884.010
					Triwulan II	6.884.010
					Triwulan III	6.884.010
					Triwulan IV	7.112.249
2.	Terwujudnya ketahanan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	90,22	Triwulan I	89,03
					Triwulan II	89,03
					Triwulan III	89,03
					Triwulan IV	90,22
3.	Pemenuhan pangan masyarakat	Persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan	Persen	40,29	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	40,29

3.5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah DIY adalah aplikasi "SENGGUH" yang dapat diakses di <http://sungguh.jogjaprov.go.id>. Aplikasi ini mengintegrasikan perencanaan Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK) dan anggaran kas dengan monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan OPD.

Gambar II.1. Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP



Sumber:<http://sungguh.jogjaprov.go.id/>

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

Bab 3 Berisi:

1. *Capaian Kinerja Tahun 2019*
2. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis*
3. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya*
4. *Realisasi Anggaran*
5. *Inovasi*

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2019

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan D.I.Yogyakarta telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan D.I.Yogyakarta dengan Bapak Gubernur D.I.Yogyakarta tahun 2019. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: *Permendagri Nomor 86 Tahun 2017*

Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	Base line 2016/2017	Capaian 2018	TAHUN 2019				TARGET AKHIR RPJMD
						TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA / KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya produksi tanaman pangan hortikultura, perkebunan dan peternakan	Indikator: Nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam PDRB (Juta rupiah) (Sumber BPS) Meta indikator: Nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam PDRB tahun n (ADHK)	Juta Rupiah	6.903 .079	7.069. 776,5	7.11 2.24 9	7.237.1 62,08	101,76	Sangat Baik	7.327. 757
2	Terwujudnya ketahanan pangan	Indikator: Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Meta indikator: % AKG X Bobot	Skor	88,5	89,92	90,2 2	95,5	105,85	Sangat Baik	91,12
3	Pemenuhan pangan masyarakat	Indikator: Persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan Meta indikator: Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan dibagi pengeluaran rata-rata perkapita sebulan total dikali 100% (Data BPS)	Persen	40,52	N/A	40,29	39,16	102,80	Sangat Baik	38,65

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

2.1.1. Sasaran 1: Peningkatan produksi tanaman pangan hortikultura, perkebunan dan peternakan

Capaian nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam PDRB tahun 2019 belum dirilis BPS, sehingga menggunakan angka perkiraan dengan mengolah data BPS untuk nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan selama beberapa tahun sebelumnya. Sebagai data dukung, capaian kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY untuk produksi tanaman pangan tahun 2019 sebesar 2.313.182 ton mengalami kenaikan 22,57% dari tahun 2018, hortikultura tercapai 398.500 ton naik 6,8% dibandingkan tahun sebelumnya, perkebunan tercapai 69.137 ton meningkat sebesar 3,80% dari tahun sebelumnya. Nilai Tukar Petani (NTP) sebagai salah satu

indikator kesejahteraan petani juga meningkat dibanding tahun sebelumnya, sehingga diprediksikan nilai sub sektor pertanian dalam PDRB DIY tahun 2019 juga mengalami kenaikan. Capaian sasaran strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan D.I.Yogyakarta dengan indikator kinerja nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan berdasarkan Permendagri Nomor 89 Tahun 2017 termasuk dalam kriteria **Sangat Baik**.

Kinerja sasaran meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dengan indikator nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dalam PDRB (Juta Rupiah) pada tahun 2019 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.3 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Sasaran	2019			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2019 terhadap target 2022 (%)
		Target	Realisasi**)	% Realisasi		
1	Nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dalam PDRB (Juta Rupiah) (Sumber BPS)	7.112.249	7.237.162,08	101,76% [[(7.237.162,08 / 7.112.249) x 100%]]	7.327.757	98,76% [[(7.237.162,08 / 7.327.757) x 100%]]

**) Angka Sangat Sementara, capaian Tahun 2019 belum dirilis oleh BPS (Data menggunakan angka olahan dengan perhitungan regresi linier terhadap capaian nilai PDRB)

Sumber: BPS Provinsi DIY diolah oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2020
Perbandingan pencapaian dari tahun 2018 ke tahun 2019 akan di jelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel III.4 Perbandingan PDRB Year on Year (YoY)

No	Indikator Sasaran	PDRB 2018	PDRB 2019**)	Perbandingan PDRB 2019** terhadap 2018*)	Pertumbuhan Antar Tahun
1	Nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan (Juta Rupiah) (Sumber BPS)	7.069.776,5	7.237.162,08 **)	102,37% [[(7.237.162,08 / 7.069.776,5) x 100%]]	2,37% [[(7.237.162,08 - 7.069.776,5) / 7.069.776,5] x 100%]

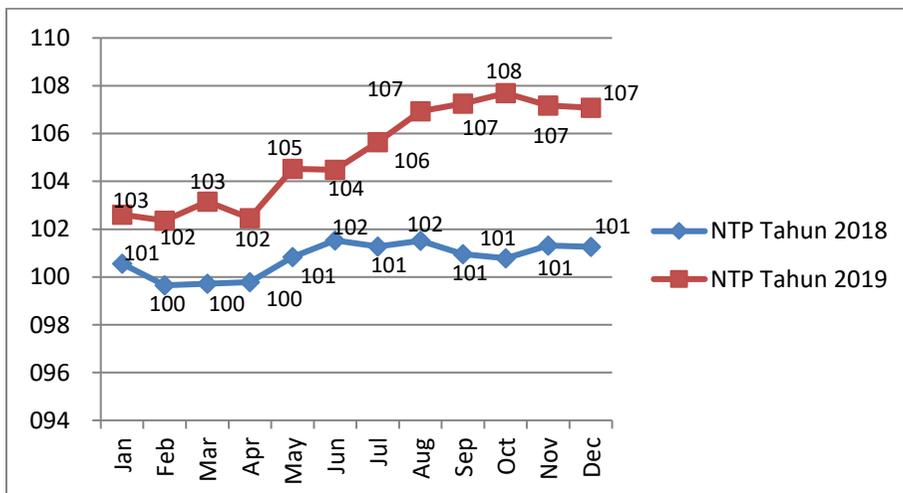
**) Angka Sangat Sementara, capaian Tahun 2019 belum dirilis oleh BPS (Data angka olahan menggunakan perhitungan regresi linier terhadap capaian nilai PDRB)

Sumber: BPS Provinsi DIY diolah oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2020

Tabel di atas menunjukkan pencapaian PDRB tahun 2019 lebih besar dibandingkan tahun 2018 sebesar 102,37% dengan nilai pertumbuhan antar tahun sebesar 2,37%. Keberhasilan pencapaian sasaran nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dalam PDRB (Juta Rupiah) pada tahun 2018 dipengaruhi oleh meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.

Selain indikator tersebut, ada indikator lain yang tidak digunakan sebagai Indikator Kinerja Utama namun dapat menggambarkan kinerja pembangunan pertanian di DIY, indikator tersebut adalah Nilai Tukar Petani (NTP). Nilai Tukar Petani adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase, merupakan salah satu indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan petani. Berikut adalah capaian nilai NTP tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018, dimana NTP tiap bulan pada tahun 2019 lebih tinggi dibanding nilai NTP pada periode bulan yang sama di tahun 2018. Nilai NTP > 100 berarti petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya sehingga pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya. Nilai NTP yang semakin tinggi menunjukkan tingkat kesejahteraan petani yang semakin tinggi.

Gambar III.1. Nilai Tukar Petani Tahun 2018 dan 2019



Sumber: BPS DIY, 2020

Tabel III.5 Capaian Program yang Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis 1 Tahun 2019

No.	Program	Indikator Sasaran	Kinerja		
			Target	Realisasi	% Realisasi
1	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Produksi tanaman pangan (ton)	2.312.780	2.313.178	100,02
2	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Produksi Perkebunan	68.877	69.137	100,38
3	Program Peningkatan Produksi Hortikultura	Produksi hortikultura (ton)	397.965	398.500	100,13
4	Program Peningkatan Populasi Peternakan	Populasi ternak (Animal Unit (AU))	622.842	584.566	93,85
5	Program Pengembangan SDM Pertanian dan Penyuluhan	Skor Nilai	73	73	100,00
6	Program Pengawasan dan Sertifikasi Benih	Jumlah sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura (hektar)	600	605,29	100,88
7	Program Perlindungan Tanaman Pertanian	Persentase pertanaman aman dari serangan OPT dan DPI (%)	95	95	100,00
8	Program Pengembangan Perbenihan	Produksi benih tanaman dan hortikultura (benih)	85	85	100,00
9	Program Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewanian	Produksi bibit ternak (ekor)	92	92,31	100,34

Sumber: Dinas Pertanian, 2020

Capaian sasaran strategis sangat dipengaruhi oleh capaian produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan. Berdasarkan tabel di atas, realisasi produksi tanaman pangan di tahun 2019 sebesar 2.313.178 ton atau terealisasi sebesar 100,02% dari target yang ditetapkan 2.312.780 ton. Pencapaian target dihitung dari nilai produksi dalam satuan ton (produksi (ton) = luas panen (ha) x produktivitas (ton/ha)) dan menjumlahkan hasil produksi 10 komoditas tanaman pangan selama 1 tahun menggunakan Angka sementara dengan rincian:

Tabel III.6 Produksi Tanaman Pangan di DIY Tahun 2018-2019

No	Komoditas	Produksi (ton)	
		2018	2019*
1	Padi	497.599	840.667
2	Jagung	299.084	344.539
3	Kedelai	18.822	6.343
4	Kacang Tanah	80.172	81.578
5	Kacang Hijau	376	163
6	Ubi Kayu	890.898	1.036.748
7	Ubi Jalar	4.113	3.116
8	Sorghum	23	23
	Jumlah	1.791.087	2.313.178

Keterangan: * Angka Sementara

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2020

Produksi tanaman pangan tahun 2019 sebesar 2.313.178 ton, mengalami kenaikan sebesar 522.091 ton (22,57%) dari tahun 2018. Produksi Gabah Kering Giling (GKG) padi total naik dari tahun 2018 sebesar 343.068 ton (35,4%). Peningkatan ini disebabkan bertambahnya luas panen padi sebesar 50.432 ha (35,4%) dan naiknya produktivitas. Program bantuan benih jagung hibrida dan pendampingan intensif bagi petani mampu meningkatkan produktivitas jagung sehingga produksinya meningkat 35.318 ton (10,25%). Kacang tanah memiliki nilai strategis yang cukup baik dan mendorong meningkatnya minat petani untuk membudidayakannya. Hal ini mendorong peningkatan produksi kacang tanah sebesar 1.406 ton (1,72%). Adanya bantuan pupuk NPK juga mampu mendorong peningkatan produktivitas ubi kayu sehingga produksinya naik 145.850 ton (14,07%).

Produksi hortikultura tahun 2019 sebesar 398.500 ton atau tercapai 100,13% dari target Tahun 2019 yaitu 397.965 ton. Peningkatan produksi Hortikultura dilaksanakan melalui kegiatan budidaya hortikultura di lahan pekarangan, di lahan Surjan, dan pengembangan sistem irigasi untuk mendukung produksi hortikultura. Serangan OPT pada tahun 2019 dapat di kendalikan dengan baik.

Produksi perkebunan tahun 2019 sebesar 69.137 ton atau tercapai 100,38 % dari target Tahun 2019 yaitu 68.877 ton. Capaian melebihi target dihitung dari data produksi tanaman perkebunan. Capaian ini meningkat dari tahun sebelumnya ditahun 2018 sebesar 66.507,50 dan di tahun 2019 sebesar 69.137,37 mengalami peningkatan sebesar 2.629,87 ton. Hal ini didukung oleh peningkatan beberapa komoditas yaitu kelapa (naik 2.353,01 ton atau 4,53 %), kakao (naik 77,86 atau 4,39%), kemiri (0,10 atau 20%) , lada (0,77 atau 11,70 %), tembakau rakyat (75,87 atau 8,54 %), tebu (207,82 atau 1,99%) dan kapas (3,11 atau 66,03%) kenaikan tersebut karena musim yang mendukung, penanganan OPT yang baik, bantuan saprodi, dan adanya bimtek pengelolaan lahan dan air.

Populasi beberapa komoditas strategis peternakan mengalami penurunan pada tahun 2019 dibanding tahun sebelumnya. Penurunan populasi sapi potong dikarenakan jumlah kelahiran tidak sebanding dengan jumlah ternak yang ke luar wilayah DIY. Populasi domba mengalami penurunan 4.985 ekor (3,35%) pada tahun 2019 karena berkurangnya kelompok pembudidaya domba dan keterlambatan peternak dalam

melakukan pencegahan dan penanganan beberapa kasus penyakit. Populasi itik menurun sebanyak 5.361 ekor (1,29%) yang disebabkan menurunnya minat peternak untuk membudidayakan itik. Populasi kambing mengalami peningkatan sebesar 1.278 ekor atau 0,31%, peningkatan ini disebabkan bertambahnya jumlah kelompok pembudidaya kambing. Populasi ayam ras petelur mengalami kenaikan sebesar 53.463 ekor atau 1,52%. Populasi ayam ras pedaging sebesar 35.366 ekor atau meningkat sebesar 0,57% dibanding tahun 2018. Jumlah populasi ternak tahun 2019 sebesar 584.566 Unit Ternak/*Animal Unit*, mengalami peningkatan 1,30% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 577.080 Unit Ternak. Peternakan di DIY didominasi ternak sapi potong dan ternak kecil. Salah satu ancaman dalam budidaya peternakan adalah serangan penyakit pada hewan ternak. Salah satunya penyakit Anthrax, yakni penyakit *zoonosis* yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia yang disebabkan oleh bakteri *Bacillus anthracis*. Kasus Penyakit Anthrax pada ternak di Kabupaten Gunungkidul pertama kali dilaporkan terjadi pada Bulan Mei 2019. Kasus tersebut terjadi di Dusun Grogol 4, Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo. Pada Bulan Desember 2019 kembali terjadi kasus Anthrax di Kabupaten Gunungkidul yaitu di Dusun Ngrejek, Desa Gombang, Kecamatan Ponjong. Penyakit tersebut dapat dikendalikan melalui kerjasama dan koordinasi yang baik antara Pemerintah Daerah Gunungkidul, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Balai Besar Veteriner Wates serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan D.I.Yogyakarta.

2.1.2. Sasaran 2: Terwujudnya ketahanan pangan

Capaian dihitung menggunakan data dari tabel konsumsi hasil SUSENAS BPS dengan menggunakan aplikasi penghitungan Skor PPH yang disediakan oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. Berikut adalah capaian Skor PPH tahun 2019:

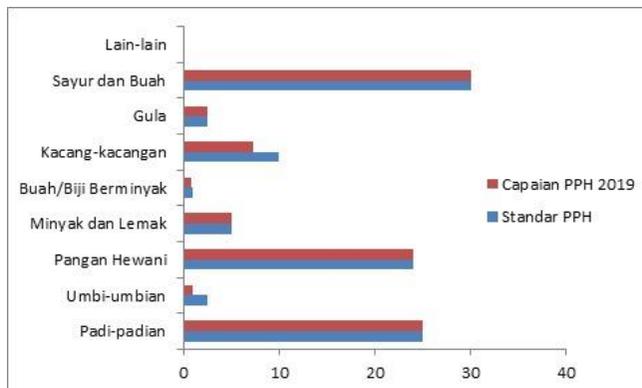
Tabel III.7 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Sasaran	2019			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2019 terhadap target 2022 (%)
		Target (skor)	Realisasi (skor)	% Realisasi		
1.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	90,22	95,5	105,85	91,12	104,80

Sumber: BPS Provinsi DIY diolah oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2020

Dari data yang diolah menggunakan aplikasi tersebut, Skor PPH DIY tahun 2019 sebesar 95,5 hasil ini meningkat dari capaian tahun sebelumnya sebesar 89,92. Skor PPH DIY lebih tinggi dari capaian Nasional sebesar 91,3. Ke depan masyarakat masih perlu didorong untuk meningkatkan beberapa golongan pangan yakni umbi-umbian, buah/biji berminyak dan kacang-kacangan karena tingkat konsumsinya masih di bawah standar yang dianjurkan.

Gambar III.2 Grafik Perbandingan Skor PPH Standar dan Capaian Skor PPH DIY tahun 2019



Keberhasilan pencapaian sasaran terwujudnya ketahanan pangan didukung oleh pencapaian program Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan yang dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

Tabel III.8 Capaian Program yang Mendukung Pencapaian Sasaran 2 Strategis Tahun 2019

No.	Program	Indikator Sasaran	Kinerja		
			Target	Realisasi	% Realisasi
1	Program peningkatan ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan	Persentase Peningkatan Ketersediaan dan Konsumsi Energi	0,08	0,69	862,50

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2020

Indikator Peningkatan Ketersediaan dan Konsumsi Energi dihitung dari rata-rata dari peningkatan angka ketersediaan energi dan peningkatan angka konsumsi energi antara tahun ini dengan tahun sebelumnya. Angka ketersediaan energi diperoleh dari Neraca Bahan Makanan yang disusun oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY bersama dengan beberapa instansi terkait sebagai penyedia data untuk penghitungan, sedangkan angka konsumsi energi merupakan *output* lain yang dihasilkan pada saat penghitungan Skor PPH menggunakan data SUSENAS BPS. Capaian angka ketersediaan energi tahun ini sebesar 3.731 kkal/kap/hari atau naik 0,0375% dibanding capaian tahun sebelumnya 3.729,6 kkal/kap/hari. Capaian angka konsumsi energi tahun ini sebesar 2.224 kkal/kap/hari atau naik 1,3350% dibanding capaian tahun sebelumnya 2.194,7 kkal/kap/hari. Jika dirata-rata maka capaian kinerja keduanya menjadi 0,69%. Capaian ini diperoleh dari total persentase peningkatan angka ketersediaan energi dan konsumsi energi di tahun 2019 sebesar $(0,0375\% + 1,3350\%)/2$ yaitu sebesar 0,69%.

Skor PPH tercapai dengan dukungan dari terselenggaranya 3 sub sistem ketahanan pangan yaitu : 1). ketersediaan, dimana capaian angka ketersediaan energi tahun 2019 sebesar 3.731 kkal/kap/hari yang melebihi standar anjuran Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) 2.400 kkal/kap/hari, jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) sebanyak 215.042 kg; 2). keterjangkauan/distribusi, dengan terjaganya stabilisasi harga pangan pokok strategis melalui fasilitasi untuk Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM), Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)/ Toko Tani Indonesia (TTI), Toko Tani Indonesia Center (TTIC); dan 3). konsumsi serta keamanan pangan, terlaksana melalui gerakan penganekaragaman pangan, konsumsi pangan lokal, Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), dan sertifikasi/registrasi PSAT.

3.1.3. Sasaran Pemenuhan pangan masyarakat

Capaian persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan belum dirilis BPS, sehingga angka capaian menggunakan angka perkiraan dari regresi linier terhadap data beberapa tahun sebelumnya. Data disajikan dalam tabel di bawah ini:

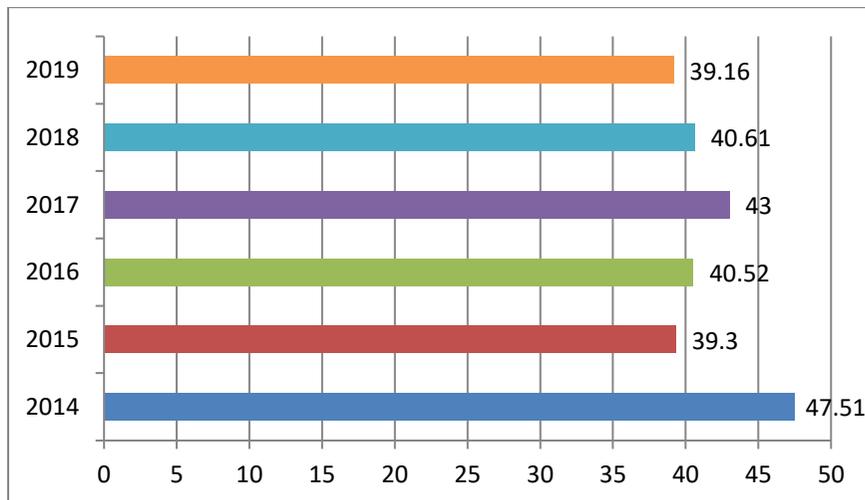
Tabel III.9 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 3

No	Indikator Sasaran	2019			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2019 terhadap target 2022 (%)
		Target (persen)	Realisasi (Persen)	% Realisasi		
1.	Persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan	40,29	39,16	102,88	38,65	97,51

Sumber: Data BPS diolah oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2020

Melihat *trend* capaian persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan dalam periode 5 tahun kebelakang cukup fluktuatif, antar tahun ada yang mengalami kenaikan ada pula yang menurun. Namun jika dihitung menggunakan metode regresi linier dengan asumsi *ceteris paribus*, ada kecenderungan menurun, angka perkiraan tahun 2019 sebesar 39,16%. Hal ini sesuai yang ditargetkan, semakin menurun setiap tahunnya.

Gambar III.3. Persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan tahun 2014-2019



Sumber : BPS DIY diolah oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2020

Jika dihubungkan dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat menjadi 6,6% dari semula 6,2% di tahun 2018 serta angka kemiskinan yang

menurun dari 12,13% di tahun 2018 menjadi 11,70% di tahun 2019, didukung capaian program pada sasaran ini yakni jumlah Desa Rawan Pangan yang juga menurun dibanding tahun sebelumnya maka dapat diindikasikan bahwa kesejahteraan masyarakat DIY semakin meningkat sehingga sesuai teori yang ada maka pengeluaran untuk konsumsi makanan akan semakin menurun. Hal ini juga sejalan dengan capaian pada sasaran lainnya yakni Skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang semakin meningkat, menunjukkan konsumsi masyarakat yang semakin beragam jenisnya dan semakin bergizi asupannya. Walaupun 57,04% konsumsi energi masyarakat DIY masih bersumber dari golongan padi-padian namun konsumsi beras sebagai makanan pokok mengalami penurunan dari 92,7 kg/kapita/tahun menjadi 88,3 kg/kapita/tahun sehingga pengeluaran masyarakat miskin yang sebagian besar untuk membeli makanan pokok semakin menurun dibanding tahun sebelumnya. Tercapainya sasaran didukung oleh capaian program pada sasaran ini yakni:

Tabel III.10 Capaian Program yang Mendukung Pencapaian Sasaran 3 Strategis Tahun 2019

No.	Program	Indikator Sasaran	Kinerja		
			Target	Realisasi	% Realisasi
1	Program Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan	Jumlah Desa Rawan Pangan	6	4	133,3

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2020

Jumlah desa rawan pangan di DIY tahun 2019 masih tersisa 4 desa tersebar di Kabupaten Kulonprogo (3 desa) dan Kabupaten Gunungkidul (1 desa), dengan rincian: 1. Banjarsari, Samigaluh, Kulonprogo; 2. Kebonharjo, Samigaluh, Kulonprogo; 3. Kalirejo, Kokap, Kulonprogo; dan 4. Tegalrejo, Gedangsari, Gunungkidul. Keempat desa rawan pangan tersebut penyebabnya lebih besar karena indikator kemiskinan. Untuk mencapai target RPJMD tahun 2022 DIY bebas dari desa rawan pangan maka diperlukan kerjasama yang sinergis dengan para pihak terkait agar permasalahan kemiskinan di desa-desa tersebut dapat diselesaikan secara tuntas.

3.2 Analisis Ketercapaian Kinerja Tahun 2019

Berdasarkan Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2019, dapat dilakukan analisis sebagai berikut:

3.2.1 Sasaran 1: Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan

- Indikator kinerja Nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam PDRB (Juta rupiah) tercapai 7.237.162,08 (juta rupiah), melebihi target tahun 2019 dengan persentase capaian 101,76% .
- Dibandingkan realisasi tahun lalu, terdapat kenaikan sebesar 2,37%.
- Dibandingkan dengan target akhir RPJMD tercapai 98,76%, diproyeksikan indikator kinerja sasaran ini akan berhasil tercapai di akhir periode RPJMD.
- Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran 1 didukung oleh:
Peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Peningkatan produksi ini didukung oleh program bantuan berupa sarana dan prasarana serta pendampingan intensif bagi petani sehingga mampu meningkatkan produksi pertanian melalui peningkatan produktivitas. Adanya dukungan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) yang baik di wilayah DIY sehingga mendukung peningkatan produksi pertanian.

3.2.2 Sasaran 2: Terwujudnya Ketahanan Pangan

- Indikator kinerja Skor Pola Pangan Harapan tercapai 95,5, melebihi target tahun 2019 dengan persentase capaian 105,85%.
- Dibandingkan realisasi tahun lalu, terdapat kenaikan 5,58 skor atau 6,2%
- Dibandingkan dengan target akhir RPJMD tercapai 104,8%, dengan upaya yang berkesinambungan capaian ini dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan sampai akhir periode RPJMD.
- Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran 2 didukung oleh:
Ketersediaan pangan di DIY telah tercukupi dengan baik dengan adanya koordinasi intensif dengan para pihak terkait untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang mencukupi. Sampai dengan tahun 2019, jumlah cadangan pangan pemerintah berupa beras telah mencapai 215.042 kg. Cadangan pangan pemerintah dan masyarakat terus dikembangkan dan ditingkatkan melalui pengadaan tiap tahunnya. Cadangan pangan sangat berguna ketika terjadi kerawanan maupun krisis pangan dan bencana. Distribusi dan akses pangan juga terus ditingkatkan. Harga pangan pokok di DIY relatif terkendali dengan adanya dukungan Tim Pemantau dan Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Harga pokok dipantau secara rutin dan

apabila perlu dilakukan operasi pasar untuk pengendalian harga. Meningkatnya Skor PPH juga didukung dengan adanya gerakan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) serta usaha pemberdayaan wanita melalui pemanfaatan pekarangan (Kawasan Rumah Pangan Lestari). Selain penganeekaragaman konsumsi pangan, aspek keamanan pangan juga penting untuk diperhatikan. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang semakin meningkat, menunjukkan konsumsi masyarakat yang semakin beragam jenisnya dan semakin bergizi asupannya.

3.2.3 Sasaran 3: Pemenuhan Pangan Masyarakat

- Indikator kinerja Persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan tercapai 39,16%, melebihi target tahun 2019 dengan persentase capaian 102,88% .
- Indikator ini belum menjadi Indikator Kinerja Utama pada tahun 2018.
- Dibandingkan dengan target akhir RPJMD tercapai 97,51%, diproyeksikan indikator kinerja sasaran ini akan berhasil tercapai di akhir periode RPJMD.
- Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran 3 didukung oleh:

Turunnya jumlah Desa Rawan Pangan dari 6 desa di tahun 2018 menjadi 4 desa di tahun 2019. Desa rawan pangan yang tersisa di tahun 2019 tersebar di Kabupaten Kulonprogo sejumlah 3 desa, yakni Banjarsari, Kebonharjo, Kalirejo dan Kabupaten Gunungkidul 1 desa yakni Tegalrejo. Salah satu indikator utama dalam penentuan desa rawan pangan adalah angka kemiskinan, semakin sedikit jumlah desa rawan pangan di DIY mengindikasikan jumlah masyarakat miskin dan rentan rawan pangan semakin berkurang. Berkurangnya desa rawan pangan didukung adanya fasilitasi untuk penumbuhan dan pengembangan desa mandiri pangan dan fasilitasi yang diberikan kepada gapoktan di daerah rawan pangan untuk mendekatkan pangan ke masyarakat sehingga tersedia pangan secara kontinyu dengan harga yang terjangkau.

Data capaian indikator makro pertumbuhan ekonomi yang meningkat menjadi 6,6% dari semula 6,2% di tahun 2018 dan angka kemiskinan yang menurun dari 12,13% di tahun 2018 menjadi 11,70% di tahun 2019, menunjukkan bahwa masyarakat DIY semakin sejahtera. Semakin sejahtera masyarakat maka proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan akan semakin menurun.

3.3 Realisasi Anggaran

Tabel III.11 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target (Rp)	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	Meningkatnya produksi tanaman pangan hortikultura, perkebunan dan peternakan	Nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam PDRB (Juta rupiah) (Sumber BPS)	7.112.249	7.237.162,08	101,76	20.535.018.713	17.608.724.952	85,75
2	Terwujudnya ketahanan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	90,22	95,5	105,85	2.136.336.100	2.038.147.856	95,40
3.	Pemenuhan pangan masyarakat	Persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan	40,29	39,16	102,80	524.986.500	492.029.400	93,72
Jumlah						23.196.341.313	20.138.902.208	86,82
Program pendukung						19.097.545.112	16.869.230.146	88,33
Total Belanja Langsung						42.293.886.425	37.008.132.354	87,50

Berdasarkan tabel III.11 di atas dari total belanja langsung program/kegiatan yang terkait pencapaian sasaran sebesar Rp 23.196.341.313, terealisasi Rp 20.138.902.208 atau 86,82%. Sisa anggaran sebesar Rp 3.057.439.105 atau 13,18 % antara lain bersumber dari:

- Sisa pengadaan barang dan jasa
- Kebijakan untuk tidak mencairkan honor non PNS bagi peserta PNS
- Efisiensi belanja perjalanan dinas
- Efisiensi honor narasumber
- Ada hibah untuk 1 kelompok yang tidak direalisasikan karena kelompok calon penerima manfaat tidak memenuhi persyaratan.

Meskipun belanja tidak terserap 100% namun keseluruhan sasaran strategis OPD tercapai diatas 100%.

3.4 Inovasi

Inovasi yang dilakukan untuk mendukung sasaran kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan antara lain sebagai berikut:

1. Proses Sertifikasi Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan merupakan salah satu tugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY. Sertifikat diberikan

kepada pelaku usaha di bidang produksi pangan yang memenuhi syarat sesuai standar administrasi dan teknis yang berlaku. Dalam SOP, secara ideal proses sertifikasi dari pendaftaran sampai dengan terbitnya sertifikat berlangsung selama 60 hari. Meski demikian pada prakteknya proses ini dapat menghabiskan waktu sekitar 6 bulan atau lebih. Inisiatif program inovasi ini bertujuan untuk memperpendek rentang waktu tersebut sehingga mendekati syarat ideal 60 hari. Inisiatif program ini pada prinsipnya berupa pendampingan kepada kelompok secara intensif dengan mengedepankan pelayanan yang bersifat personal, koordinatif dan dengan pemanfaatan teknologi. Untuk menggunakan layanan tersebut, masyarakat atau pelaku usaha didalam mendaftarkan produk-produk PSAT-nya dapat mengunjungi alamat website:
<http://okkpd.jogjaprovo.go.id/>

Gambar III.4 Website OKKPD



2. Penanggulangan hama, terutama tikus dengan menggunakan APEM TIKUS SIJI (Alat pemburu tikus dengan gas elpiji). Produksi padi terkendala karena hama tikus yang masih berkembang didalam liang. Pengendalian hama tikus yang efektif salah satunya dengan pengasapan. Cara ini dilakukan dengan membakar belerang dan gas belerang, hasil pembakaran ini dapat membunuh tikus sawah.

Gambar III.5 Inovasi alat pemburu tikus dengan gas elpiji



BAB 4

Penutup

Bab 4 Berisi:

1. *Kesimpulan*
2. *Rekomendasi*
3. *Peningkatan kinerja*

Hasil laporan kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tahun 2019 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Permasalahan yang masih terjadi dalam kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan D.I.Yogyakarta yaitu alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang belum dapat dikendalikan secara optimal. Sektor pertanian merupakan salah satu penyerap tenaga kerja terbesar, namun minat generasi muda untuk bekerja di bidang pertanian semakin menurun. Jumlah desa rawan pangan dari tahun ke tahun terus menurun, namun masih terdapat 4 Desa Rawan Pangan sampai akhir tahun 2019. Belum meratanya pengetahuan dan kesadaran masyarakat serta pelaku usaha tentang pentingnya keamanan pangan. Hal ini terlihat dari belum semua pangan yang beredar di masyarakat terjamin mutu dan keamanannya. Diperlukan adanya kontrol dari pemerintah dalam penanganan masalah ini.
2. Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan D.I.Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2019 berjalan dengan baik, keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak dan dukungan SDM yang kompeten. Koordinasi dengan Kabupaten dan lintas sektor juga menjadi faktor pendukung keberhasilan penyelenggaraan kegiatan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan D.I.Yogyakarta.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Review Perda No. 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait. Tahun 2019 sudah dimulai dengan menyusun kajian Naskah Akademik, harapannya tahun 2020 review Perda No.10 Tahun 2011 sudah ditetapkan menjadi produk hukum yang dapat ditindaklanjuti dengan

penyusunan aturan-aturan turunannya sehingga bisa segera diimplementasikan.

2. Menumbuhkembangkan wirausaha tani melalui diklat kewirausahaan dan manajemen agribisnis secara berkelanjutan.
3. Meningkatkan kerjasama dan sinergitas dengan para pihak terkait dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan pangan yang ada di DIY, khususnya dalam mengentaskan kerawanan pangan dan kemiskinan.
4. Menyebarkan informasi pangan aman dan sehat, melaksanakan pendampingan produksi pangan yang baik dan benar, dan meningkatkan kinerja pengawasan melalui Tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD) dalam mengamankan pangan yang diproduksi maupun pangan yang beredar, baik segar maupun olahan.

Adapun rencana aksi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:

1. Koordinasi dan harmonisasi intensif dengan OPD lain dan Pemerintah Pusat.
2. Implementasi hasil kegiatan perlu dimonitor dan dievaluasi secara berkala agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat terus berkembang dan meningkat pada periode mendatang sesuai dinamika dan target yang telah ditetapkan.
3. Koordinasi dan komunikasi internal Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY secara lebih intensif.

L A M P I R A N

Lampiran 1. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

RENSTRA 2017-2022

Tabel 4.2. Tujuan, Sasaran, dan Target Kinerja Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan (Renstra)	Sasaran (Renstra)	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	Tumbuhnya perekonomian sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan di DIY (Indikator: peningkatan nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dalam PDRB dari tahun 2017 ke tahun 2022 sebesar 6.15%)	Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan	Nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam PDRB (Juta rupiah) (Sumber BPS)	N/A	7.112.249	7.183.372	7.255.205	7.327.757
2	Meningkatnya kualitas ketahanan pangan masyarakat	Terwujudnya ketahanan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	N/A	90,22	90,52	90,82	91,12
3	(Indikator: persentase peningkatan Skor Pola Pangan Harapan dari tahun 2017 ke tahun 2022 sebesar 2.96%)	Pemenuhan pangan masyarakat	Persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan	N/A	40,29	39,74	39,19	38,65

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2019



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta Telepon (0274) 588938, Faksimile (0274) 563937
Website: <http://distan.jogjaprov.go.id> Email: distan@jogjaprov.go.id Kode Pos 55165

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. SASONGKO, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HAMENGKU BUWONO X
Jabatan : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, Januari 2019

PIHAK KEDUA
Gubernur
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN

Ir. SASONGKO, M.Si
NIP. 19591218 198603 1 007

PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Tahun Anggaran : 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan	Nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam PDRB (Sumber BPS)	Juta rupiah	7.112.249	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	6.884.010 6.884.010 6.884.010 7.112.249
2.	Terwujudnya ketahanan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	90,22	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	89,03 89,03 89,03 90,22
3.	Pemenuhan pangan masyarakat	Persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan	Persen	40,29	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	- - - 40,29

Jumlah Anggaran	: Rp.	42.474.626.818,00	Keterangan
1. Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	: Rp.	6.444.553.860,00	Anggaran APBD
2. Program Peningkatan Produksi Hortikultura	: Rp.	1.786.193.000,00	Anggaran Dekonsentrasi/TP
3. Program Peningkatan Produksi Perkebunan	: Rp.	1.584.262.000,00	Anggaran Dana
4. Program Peningkatan Populasi Peternakan	: Rp.	3.177.479.000,00	Keistimewaan (pengampu)
5. Program Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Keahewanan	: Rp.	4.237.173.060,00	
6. Program Pengembangan SDM Pertanian dan Penyuluhan	: Rp.	728.010.520,00	
7. Program Perlindungan Tanaman Pertanian	: Rp.	477.884.580,00	
8. Program Pengembangan Perbenihan Pertanian	: Rp.	1.997.869.274,00	
9. Program Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian	: Rp.	393.648.540,00	
10. Program Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan (dilimpahkan ke Wakil Kepala Dinas)	: Rp.	2.136.336.100,00	
11. Program Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan (dilimpahkan ke Wakil Kepala Dinas)	: Rp.	525.000.000,00	
12. Program Administrasi Perkantoran	: Rp.	4.657.800.340,00	
13. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	: Rp.	12.715.368.104,00	
14. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	: Rp.	Rp 44.770.000,00	

15. Program Peningkatan Pengembangan : Rp. 468.278.440,00
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Pelaporan Keuangan



Yogyakarta, Januari 2019



Lampiran 3. Evaluasi LKj IP Tahun Sebelumnya



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
INSPEKTORAT

KOMPLEKS YOUTH CENTER, JALAN KEBON AGUNG, TLOGOADI,
MLATI, KABUPATEN SLEMAN
TELP. (0274) 562009 FAX (0274) 512567
Website : <http://inspektorat.jogjaprov.go.id>
Email: inspektorat@jogjaprov.go.id

Yogyakarta, 06 - 06 - 2019

Nomor : 700/013A1
Sifat :
Lampiran :
Hal. : Laporan Hasil Evaluasi
atas Implementasi Sistem AKIP
Tahun Anggaran 2018
Pada Dinas Pertanian DIY

Kepada
Yth. Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta
di -
Yogyakarta

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP, maka ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116/III/INSP/2019 tanggal 5 Maret 2019 tentang Evaluasi atas Implementasi SAKIP SKPD Tahun Anggaran 2018 untuk seluruh SKPD. Sehubungan hal tersebut, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian DIY dengan tujuan:
 - a. Memperoleh informasi tentang Implementasi Sistem AKIP;
 - b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
2. Dalam melakukan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Tim Evaluasi (Evaluators) Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan penilaian terhadap aspek-aspek sebagai berikut:
 - a. Aspek Perencanaan Kinerja meliputi:
 - 1) Perencanaan Strategis, meliputi sub komponen Pemenuhan Renstra, Kualitas Renstra dan Implementasi Renstra

- 2) Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, meliputi:
 - sub komponen Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan (Perjanjian Kinerja, Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan (Perjanjian Kinerja, serta Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahunan.
 - b. Aspek Pengukuran Kinerja meliputi:
 - 1) Pemenuhan Pengukuran;
 - 2) Kualitas Pengukuran;
 - 3) Implementasi Pengukuran.
 - c. Aspek Pelaporan Kinerja meliputi:
 - 1) Pemenuhan Pelaporan;
 - 2) Penyajian Informasi Kinerja;
 - 3) Pemanfaatan Informasi Kinerja.
 - d. Evaluasi Internal meliputi:
 - 1) Pemenuhan Evaluasi;
 - 2) Kualitas Evaluasi;
 - 3) Pemanfaatan Evaluasi.
 - e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi meliputi:
 - 1) Kinerja yang di Laporkan (*Output*);
 - 2) Kinerja yang di Laporkan (*Outcome*);
 - 3) Kinerja yang di Laporkan (IKU);
 - 4) Kinerja dari Penilaian Stakeholder.
3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100. Dinas Pertanian DIY memperoleh nilai sebesar **84,19** kategori **A** dengan interpretasi memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel. ✓
4. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di Dinas Pertanian DIY dengan rincian sebagai berikut:
- a. Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 29,23 atau 97,42% dari bobot sebesar 30%;
 - b. Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 22,29 atau 89,17% dari bobot sebesar 25%;
 - c. Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 13,03 atau 86,88% dari bobot sebesar 15%;
 - d. Evaluasi Internal memperoleh nilai 8,08 atau 80,83% dari bobot sebesar 10%;
 - e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi memperoleh nilai 11,56 atau 57,81% dari bobot sebesar 20%.
5. Terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat DIY pada Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun 2017, yaitu terkait dengan capaian kinerja organisasi meliputi *output*, *outcome*, kinerja utama, dan kinerja dari penilaian *stakeholder* telah dilakukan perbaikan.

6. Sehubungan dengan hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2018 seperti tersebut pada angka 4 di atas, direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pertanian DIY beserta seluruh jajarannya agar pada tahun anggaran berikutnya melakukan tindakan perbaikan yang lebih optimal terutama terkait dengan capaian kinerja organisasi meliputi *output*, *outcome*, dan kinerja dari penilaian *stakeholder*.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Dinas Pertanian DIY Tahun Anggaran 2018, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

INSPEKTUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



WYON SANTOSO, S.E., M.Acc. *W.S.*
NIP. 19680215 199403 1 005

Tembusan:
Kepala Dinas Pertanian DIY



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
INSPEKTORAT

KOMPLEKS YOUTH CENTER, JALAN KEBON AGUNG,
TLOGOADI, MLATI, KABUPATEN SLEMAN
TELP. (0274) 562009 FAX (0274) 512567
Website : <http://inspektorat.jogjaprov.go.id>
Email: Inspektorat@jogjaprov.go.id

Yogyakarta, 06 - 05 - 2019

Nomor : 700/01339
Sifat :
Lampiran : -
Hal. : Laporan Hasil Evaluasi
atas Implementasi Sistem AKIP
Tahun Anggaran 2018
Pada Badan Ketahanan Pangan
dan Penyuluhan DIY

Kepada
Yth. Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta
di -
Yogyakarta

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP, maka ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116/III/INSP/2019 tanggal 5 Maret 2019 tentang Evaluasi atas Implementasi SAKIP SKPD Tahun Anggaran 2018 untuk seluruh SKPD. Sehubungan hal tersebut, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY dengan tujuan:
 - a. Memperoleh informasi tentang Implementasi Sistem AKIP;
 - b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
2. Dalam melakukan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Tim Evaluasi (Evaluator) Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan penilaian terhadap aspek-aspek sebagai berikut:
 - a. Aspek Perencanaan Kinerja meliputi:
 - 1) Perencanaan Strategis, meliputi sub komponen Pemenuhan Renstra, Kualitas Renstra dan Implementasi Renstra;

- 2) Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, meliputi sub komponen Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, serta Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahunan.
 - b. Aspek Pengukuran Kinerja meliputi:
 - 1) Pemenuhan Pengukuran;
 - 2) Kualitas Pengukuran;
 - 3) Implementasi Pengukuran.
 - c. Aspek Pelaporan Kinerja meliputi:
 - 1) Pemenuhan Pelaporan;
 - 2) Penyajian Informasi Kinerja;
 - 3) Pemanfaatan Informasi Kinerja.
 - d. Evaluasi Internal meliputi:
 - 1) Pemenuhan Evaluasi;
 - 2) Kualitas Evaluasi;
 - 3) Pemanfaatan Evaluasi.
 - e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi meliputi:
 - 1) Kinerja yang di Laporkan (*Output*);
 - 2) Kinerja yang di Laporkan (*Outcome*);
 - 3) Kinerja yang di Laporkan (IKU);
 - 4) Kinerja dari Penilaian Stakeholder.
3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY memperoleh nilai sebesar **84,54** kategori **A** dengan interpretasi memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel.
4. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY dengan rincian sebagai berikut:
- a. Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 27,50 atau 91,67% dari bobot sebesar 30%;
 - b. Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 23,65 atau 94,58% dari bobot sebesar 25%;
 - c. Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 12,00 atau 80,00% dari bobot sebesar 15%;
 - d. Evaluasi Internal memperoleh nilai 7,75 atau 77,50% dari bobot sebesar 10%;
 - e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi memperoleh nilai 13,65 atau 68,23% dari bobot sebesar 20%.
5. Terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat DIY pada Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun 2017 yaitu terkait dengan capaian kinerja organisasi meliputi *output*, *outcome*, kinerja utama, dan kinerja dari penilaian *stakeholder* telah dilakukan perbaikan.

6. Sehubungan dengan hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2018 seperti tersebut pada angka 4 di atas, direkomendasikan kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY beserta seluruh jajarannya agar pada tahun anggaran berikutnya melakukan tindakan perbaikan yang lebih optimal terutama terkait dengan capaian kinerja organisasi meliputi *output*, *outcome*, dan kinerja dari penilaian *stakeholder*.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY Tahun Anggaran 2018, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:
Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY

